



Artikel

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Martinus Wika¹ dan Beatus Tambaip^{2*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke

² Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Musamus

* Korespondensi : beatus@unmus.ac.id

Abstract: This study was conducted to analyze and describe the implementation of the Village Financial Management Policy carried out by the Kiworo Village Government since 2015-2017 with a total budget of Rp. 1,400,000,000 (One Billion Four Hundred Million Rupiah), but the management is still very far from expectations. The method used is a qualitative method which is also adapted to the characteristics, so this research was carried out with a qualitative descriptive research design, with 12 informants consisting of the Kiworo Village apparatus including the Village Head, Village Community Leaders and the Head of the Kimaam District Government. Based on the results of research conducted by the author in Kiworo Village related to the author's title Implementation of village financial management policies in Kiworo Village, Kimaam District, Merauke Regency, Papua Province, the authors found (1). The occurrence of unaccountable village financial management, due to the apathetic attitude and behavior of village officials towards regulation. they always do not carry out village financial management that is not in accordance with regulations so that the process does not run properly starting from the planning, implementation, and reporting processes as well as monitoring and evaluation. (2). There are several inhibiting factors, including the lack of human resources, lack of communication, attitudes, and behavior of village officials, village financial management patterns that have not been maximized, lack of supporting facilities and infrastructure, absence of strict sanctions from the district government, so that efforts to carry out financial management processes The village with a table account is very difficult in Kiworo village because it is influenced by several factors above. (3). The strategy that must be carried out is to optimize the financial management process from planning, implementation to reporting and monitoring and evaluation, by utilizing existing regulations. It is suggested to the Kiworo village government, in carrying out the village financial management process, it is mandatory to refer to Law no. 06 of 2014 concerning Villages and, Permendagri No. 113 Regarding Village Financial Management and its hierarchy up to PEDES and the Government must pay attention to the work wages given to village officials and must be determined with rules so that it is clear to the apparatus.

Keywords: Kampung Kiworo; Policy; Financial Management

Abstract: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskriptifkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kiworo sejak tahun 2015-2017 dengan total anggaran Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun pengelolaannya masih sangat jauh dari pada harapan. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan informan sebanyak 12 Orang yang terdiri dari perangkat Kampung Kiworo termasuk Kepala Kampung, Tokoh-tokoh Masyarakat Kampung dan Kasi Pemerintahan Distrik Kimaam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kampung Kiworo terkait judul penulis Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka penulis menemukan (1). Terjadinya pengelolaan keuangan kampung yang tidak akuntabel, karena sikap dan perilaku

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

apatis perangkat kampung terhadap regulasi. mereka senantiasa tidak menjalankan pengelolaan keuangan kampung tidak sesuai dengan regulasi sehingga prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengawasan dan evaluasi. (2). adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akan sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas. (3). Strategi yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada pelaporan dan pengawasan dan evaluasi, dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Disarankan kepada Pemerintah kampung kiworo, dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan kampung wajib mengacu kepada UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan, Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hirarkinya sampai dengan PEDES serta Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat.

Keywords: Kampung Kiworo; Kebijakan; Pengelolaan Keuangan

1. Pendahuluan

Dengan memiliki otonomi murni tersebut maka desa/kampung diberikan kewenangan untuk mengembangkan wilayah serta memajukan kehidupan masyarakat desa/kampung yang mandiri, sehingga negara dalam hal ini presiden republik indonesia memberikan kebijaksanaan kepada desa/kampung untuk dapat mengelola keuangan desa/kampung itu sendiri, yang mana keuangan desa/kampung tersebut diharapkan oleh pemerintah dapat digunakan sebanyak-banyaknya untuk pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat, kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa/kampung di desa/kampung kiworo tersebut.

Sehingga dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa/kampung dapat diakomodir dengan lebih baik dengan Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa/kampung untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat di desa/kampung-kampung di seluruh indonesia, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan lainnya dapat diminimalisir.

Pembangunan infrastruktur tidak nampak, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat tidak ada yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Menurut Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke Tahun 2016). Dana yang didapatkan di setiap kampung di kabupaten merauke bervariasi tergantung jauh dekat Lokasi kampung, Luas Wilayah Kampung dan Jumlah penduduknya, untuk kampung kiworo sendiri pada tahun 2014 atau dana desa yang di kucur pemerintah adalah berkisar kurang lebih Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang di awal tahun 2015 jumlah uang/dana kampung ditambah jumlah dananya hingga berkisar Rp. 900.400.000. (Sembilan Ratus Juta Empat Ribu Rupiah) tetapi Mulai tahun 2016-2017 Anggarannya dinaikan menjadi Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah), dan direncanakan pada tahun 2018 ini dana desa akan mengalami kenaikan lagi, Namun dari total dana kampung yang begitu besar dan periode waktu yang cukup lama belum ada pembangunan satupun yang nampak di 5 (Lima), kampung pada wilayah distrik

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Kimaam tersebut dan bagaimana dengan 9 desa/kampung-kampung yang berada di pinggiran pusat distrik kimaam bagaimana dengan kampung-kampung yang terpencil, pastinya lebih parah lagi pengelolaan keuangannya. Ini merupakan sebuah realitas dalam pengelolaan keuangan Kampung pada 14 (Empat Belas) Kampung di Wilayah Hukum Distrik Kimaam yaitu: Kampung Kimaam, Kampung Mambum, Kampung Kiworo, Kampung Woner, Kampung Deka, Kampung Turiram, Kampung Kalilam, kampung Kumbis, Kampung Komolom, Kampung Teri, Kampung Sabudon, Kampung Purawanderu, Kampung Umanderu, dan Kampung Webu, di distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif (Nawawi, 2009). desain kualitatif dipilih mengingat penelitian bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik dan penelitian ini juga lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi dimana pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi di lakukan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi pada subjek yang diteliti untuk memahami dan mengungkapkan maknanya.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif yaitu, menemukan fakta dan interpretasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Dengan metode ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami (natural), tentang Bagaimana fungsi Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua. pendekatan kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik yang ada bahwa peneliti secara langsung terlibat dilokasi penelitian melalui pengamatan peran serta (participant observation)

Penggunaan pendekatan metode kualitatif menekankan kepada permasalahan mengenai apa adanya (das Sein) dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui kata-kata lisan atau tertulis dan orang dan perilaku yang diamati. Melalui metode kualitatif yaitu yang dilakukan seorang peneliti dan peneliti sebagai instrumen penelitian yang memahami tentang karakteristik di lapangan yang berintegrasi dengan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Para aparat kampung dan tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di kampung wilayah kerja kampung kiworo distrik kimaam kabupaten merauke provinsi papua.

3. Hasil dan Pembahasan

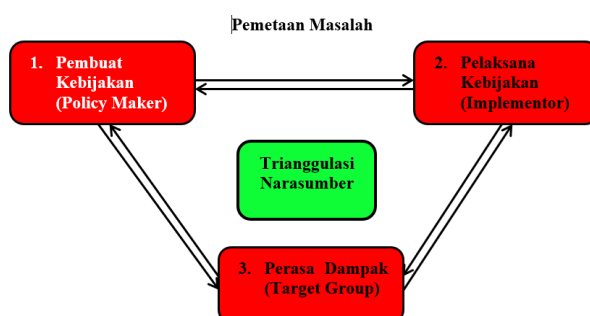
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa SWOT (Palapa et al., 2020). Analisa SWOT adalah proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam kategori *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, *Threats*, sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan strategi, langkah kegiatan, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilihat faktor-faktor apa saja yang dimiliki oleh pemerintahan Kampung Kiworo dalam meminimalkan pola pengelolaan Keuangan kampung. Kemudian, data akan di olah dan ditentukan faktor kunci keberhasilan, selanjutnya di tentukan strategi apa yang mungkin dapat di gunakan oleh Pemerintah Kampung Kiworo guna mengefektifkan proses pengelolaan keuangan kampung yang diberikan. Dalam melaksanakan penelitian dengan analisa SWOT, terdapat delapan tahapan atau langkah

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

yang harus di lalui dimana masing-masing tahapan memiliki nilai keterkaitan satu sama lain. Delapan langkah dalam pelaksanaan analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Pemetaan Masalah

Mencatat masalah-masalah yang berasal dari hasil wawancara, hasil observasi dan/atau melihat langsung. Metode wawancara melalui Triangulasi narasumber.



Menurut para informan, adapun masalah-masalah yang terjadi saat ini sehingga Implementasi Pengelolaan Keuangan Kampung kurang baik atau belum maksimal dikampung kiworo distrik kimaam kabupaten merauke provinsi papua disebabkan beberapa faktor, yakni:

- Kepala Kampung Kiworo
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- Struktur Birokrasi Pemerintahan Kampung
- Sikap/perilaku
- Kurangnya Komunikasi
- Sekretaris Kampung Kiworo
 - a. Sarana dan Prasarana Kampung
 - b. Tidak adanya Komunikasi
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Sikap/perilaku
- KAUR Pemerintahan Kampung Kiworo
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pelaporan
- KAUR Pembangunan Kampung Kiworo
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Sikap/Perilaku
 - Sarana dan Prasarana Kampung
 - Kurangnya Komunikasi
- BPK Kampung Kiworo
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pelaporan
 - Pengawasan/Evaluasi

Tokoh Agama

- Tidak adanya Keterbukaan dari Pemerintah Kampung
- Upah Kerja Sesuai Standar Minimum
- Kejujuran

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tokoh Adat

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak Menguasai IT

Tidak memahami Tugas dan Fungsi

Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum Maksimal

Tokoh Pemuda

Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum maksimal

Sikap/Perilaku

Kejujuran

Tokoh Perempuan

Keadilan

Tidak di Berdayakan

Tidak ada Keterbukaan Pemimpin Kampung

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Kimaam

Proses pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal

Tidak berjalannya Komunikasi diantara semua stakeholder di kampung

Tidak adanya kedisiplinan perangkat kampung

Belum ada sanksi yang tegas

Setelah dilakukan triangulasi awal terhadap ke delapan informan tersebut di peroleh indentifikasi masalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya Komunikasi

Sikap dan Perilaku Perangkat Kampung

Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum maksimal

Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang

Tidak adanya Sanksi yang tegas dari pemerintah Kabupaten

Menentukan Masalah Utama

Ada tiga aspek dalam menentukan masalah utama yang harus di pertimbangkan yaitu: *Urgency* (kegawatan) besarnya dampak masalah terhadap keselamatan jiwa, uang, produksi, dan/atau reputasi individu maupun organisasi. Penilaian berdasarkan skala like 3 yaitu:

tidak berbahaya: 1

berbahaya: 2

sangat berbahaya: 3

Seriousness (mendesak) dilihat dari ketersediaan waktu penanganan. Penilaian berdasarkan skala liker 3 yaitu:

tidak mendesak: 1

mendesak: 2

sangat mendesak: 3

Growth (pertumbuhan) perkiraan akan bertambah buruknya keadaan pada saat masalah mulai terlihat dan sesudahnya. Penilaian berdasarkan skala liker 3 yaitu:

tidak berkembang: 1

berkembang: 2

sangat berkembang: 3

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Untuk menentukan masalah utama, menggunakan matrik urgensi (*Urgency, Seriously, Growthly*) melalui identifikasi-identifikasi masalah yang ada. Maka matrik USG nya adalah:

Tabel 1. Masalah Utama

No	Pemetaan Masalah	Matriks USG			Skor
		U	S	G	
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	3	3	9
2	Kurangnya Komunikasi	3	2	3	8
3	Sikap dan Perilaku Perangkat Kampung	2	2	2	6
4	Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum Maksimal	3	2	2	7
5	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kantor Kampung	1	2	2	5
6	Tidak adanya Sanksi yang tegas dari Pemerintah Kabupaten	2	2	3	7

Berdasarkan tabel di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini yaitu pemetaan masalah yang memiliki skor tertinggi (nomor 1. Kurangnya Sumberdaya Manusia Pada Struktur Pemerintahan Kampung Kiworo).

Maka yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Kampung yang efektif dan efisien sangat sulit dan belum terpenuhi di kampung kiworo pengelolaan keuangan kampungnya.

Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat

Sasaran adalah Strategi pemerintahan Kampung dalam menciptakan Sumber Daya Manusia kampung kiworo sehingga proses pengelolaan keuangan yang mulai dari proses Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan dapat dijalankan dengan maksimal atau secara baik dan benar.

Masalah utama adalah Sumber Daya Manusia dalam struktur Pemerintahan Kampung yang sangat Kurang.

Tabel 4.14

Faktor Pendorong dan Penghambat

No	Faktor Pendorong	E/I	No	Faktor Penghambat	E/I
1	Adanya aturan pengelolaan keuangan kampung yaitu Pemendagri No.113 Tahun 2014.	I	1	Kurang Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah kampung	I
2	Adanya pengawasan Tokoh-tokoh masyarakat	I	2	Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran tugas	I
3	Upah kerja sesuai standar minimum	E	3	Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai	E
4	Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya	E	4	Komunikasi tidak berjalan dengan baik	E

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Keterangan:

I : Internal

E : Eksternal

Selanjutnya, memasukan faktor pendorong dan penghambat di atas ke dalam Matriks Analisa SWOT, dengan catatan:

faktor pendorong internal akan menjadi kekuatan (*strenght*)

faktor pendorong eksternal akan menjadi peluang (*opportunity*)

faktor penghambat internal akan menjadi kelemahan (*weakness*)

faktor penghambat eksternal akan menjadi ancaman (*thereat*)

Tabel 4.15
Faktor Pendorong dan Penghambat

		Strenght (S)		Weaknes (W)	
Faktor Internal	S₁	Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.	W₁	Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Struktur Pemerintahan Kampung	
	S₂	Adanya pengawasan Masyarakat	W₂	Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran Tugas	
		Opportunity (O)		Threat (T)	
Faktor Eksternal	O₁	Upah kerja Sesuai Standar Minimum	T₁	Sarana dan Prasarana Kerja yang kurang Memadai	
	O₂	Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya	T₂	Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik	

Menentukan Nilai Matriks Masing-masing Internal dan Eksternal

Setelah itu membuat matriks urgensi dari masing-masing faktor internal dan eksternal. Sasaran adalah strategi pemerintahan kampung dalam melakukan kebijakan pengelolaan keuangan kampung.

Tabel 4.16
Matriks Nilai Urgensi Faktor Internal

No	Faktor Internal	Faktor yang lebih Urgeen				Nilai Urgeen (NU)	Bobot Faktor (BF)
		a	b	c	d		

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

a	S₁	Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014.	a	a	a	3	0,5	
b	S₂	Adanya Pengawasan Masyarakat.	b		c	b	2	0,3
c	W₁	Kurangnya Sumber Daya Manusia.	a	c		d	1	0,2
d	W₂	Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran tugas.	a	b	c		0	0
							6	1

Tabel 4.17
Matriks Nilai Urgensi Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Faktor yang lebih Urgeen				Nilai Urgeen (NU)	Bobot Faktor (BF)	
		a	b	c	d			
a	O₁	Upah Kerja Sesuai Stadar Minimum		b	a	a	2	0,3
b	O₂	Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya	b		b	b	3	0,5
c	T₁	Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai	a	b		c	1	0,2
d	T₂	Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik	a	b	c		0	0
							6	1

Keterangan:

BF : Bobot Faktor

NU : Nilai Urgensi

\sum NU : Total Nilai Urgensi

Selanjutnya membuat Nilai Dukung (ND). Sasaran adalah ketidak pedulian perangkat desa atas tugas yang diberikan.

Tabel 4.18
Matriks Nilai Dukung Faktor Internal

No	Faktor Internal	Faktor yang lebih mendukung				Nilai Dukung (ND)	
		a	b	c	d		
a	S₁	Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014.		a	a	a	3
b	S₂	Adanya pengawasan Masyarakat.	b		c	b	2
c	W₁	Adanya beberapa alternatif untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan Kampung.	a	c		d	1

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

d	W₂	Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Struktur Pemerintahan Kampung.	a	b	c	0
e	W₃	Tidak adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran Tugas.				
						6

Tabel 4.19
Matriks Nilai Dukung Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Faktor yang lebih mendukung				Nilai Dukung (ND)
		a	b	c	d	
a	O₁	Upah Kerja Sesuai Standar Minimum	b	a	a	2
b	O₂	Adanya Aspirasi Kebutuhan Prioritas Masyarakat	b	b	b	3
c	T₁	Sarana dan Prasarana Kerja yang kurang memadai	a	b	c	1
d	T₂	Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik	a	b	c	0
						6

Evaluasi Matriks Internal dan Eksternal

Keterangan tabel evaluasi matriks internal eksternal: sasaran Strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi masyarakat desa. Menentukan nilai keterkaitan menggunakan skala likert sebagai berikut:

sangat terkait : 4
terkait : 3
tidak terkait : 2
sangat tidak terkait : 1

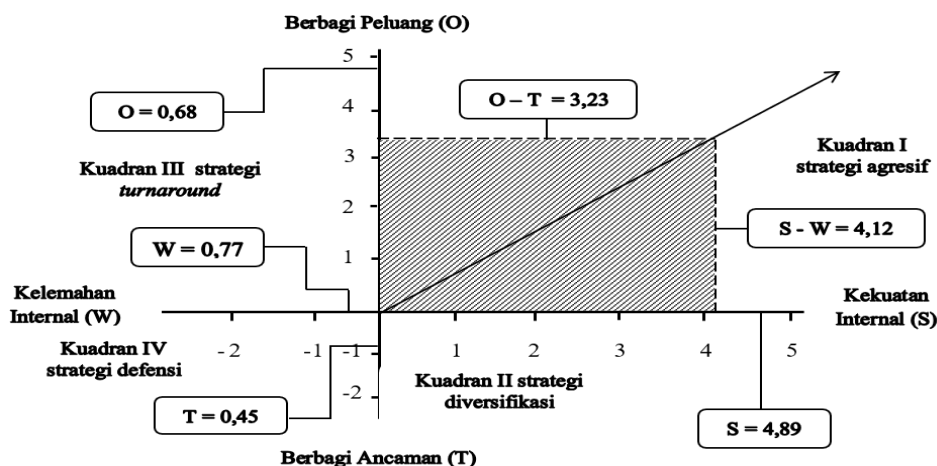
Menentukan Peta Kekuatan Organisasi

Selisih ideal nilai bobot faktor internal yaitu TNB kekuatan (S) di kurangi TNB kelemahan (W) $S - W = 4,89 - 0,77 = 4,12$

Selisih total nilai bobot faktor eksternal yaitu TNB peluang (O) di kurangi TNB ancaman (T) $O - T = 3,68 - 0,45 = 3,23$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, posisi kunci keberhasilan dapat dilihat pada peta kekuatan organisasi di bawah ini:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke



Kuadran I adalah faktor keberhasilan dalam memproyeksikan tujuan organisasi dengan memanfaatkan aturan pengelolaan keuangan yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh dalam mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang baik sesuai dengan misi organisasi.

Kuadran II adalah faktor keberhasilan dalam memproyeksikan tujuan organisasi dengan cara mengoptimalkan kebijakan pengelolaan keuangan kampung yang dikerjakan perangkat kampung untuk memberikan sanksi hukuman kepada siapa saja yang melanggarnya guna mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan kampung dengan baik dan benar.

Kuadran III adalah faktor keberhasilan dalam memproyeksikan tujuan organisasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia para perangkat Kampung untuk menerima Alternatif untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan kampung guna mewujudkan proses pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel.

Kuadran IV adalah faktor keberhasilan dalam memproyeksikan tujuan organisasi dengan menghilangkan sikap dan perilaku apatis perangkat kampung melalui penegasan sanksi hukum bagi yang melanggarnya guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang baik.

Berdasarkan hasil peta kekuatan organisasi di atas, peta kekuatan terletak pada kuadran I yaitu posisi antara peluang (*opportunities*) dengan kekuatan (*strengthes*) dengan posisi 4,12 : 3,23. Posisi tersebut menandakan bahwa organisasi memiliki kemampuan yang dapat di tinggikan untuk mewujudkan pola pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertip serta disiplin anggaran di kampung.

Formulasi Strategi SWOT

Matriks SWOT dapat di gunakan untuk menentukan strategi yang akan dijalankan organisasi. Ada empat strategi yaitu.

S – O yaitu memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk meraih peluang. Strategi: Manfaatkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Kampung PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 motivasi kerja perangkat desa sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang baik.

W – O yaitu memperbaharui kelemahan internal guna meraih peluang. Strategi: Tingkatkan proses pengelolaan keuangan kampung dengan memanfaatkan upah sesuai standar minimum yang mereka peroleh guna mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan kampung yang baik dan benar.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

S – T yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Strategi: Optimalkan pengelolaan keuangan kampung untuk memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggarnya guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung efektif dan efisien.

W – T yaitu mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman eksternal. Strategi: Tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk memahami regulasi pengelolaan keuangan dan diberikan melalui penegasan sanksi hukum bagi yang melanggarnya guna mewujudkan pola pengelolaan keuangan kampung yang baik.

Tabel 4.21

Formulasi Strategi SWOT

	STRENGHT Adanya aturan pengelolaan keuangan kampung.	WEAKNESES Kurang memahami atas tugas dan fungsi.
OPPORTUNITIES	S – O Manfaatkan aturan pengelolaan keuangan yang ada sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh.	W – O Tingkatkan kemampuan perangkat desa dalam memahami tugas pengelolaan keuangan kampung dengan memanfaatkan upah kerja sesuai standar minimum yang mereka peroleh.
THREATS	S – T Optimalkan pengelolaan keuangan kampung dan memberikan sanksi hukuman kepada siapa saja yang melanggarnya.	W – T Tingkatkan Sumber Daya Manusia perangkat kampung untuk memahami aturan pengelolaan keuangan kampung dan berikan melalui penegasan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
Upah kerja sesuai standar minimum.		
Tidak adanya sanksi hukuman atas pelanggaran tugas.		

Keterangan:

(*Strenght – Weakness – Opportunities – Threat*) diambil berdasarkan nilai tertinggi pada kolom Total Nilai Bobot (TNB) pada tabel 4.8. Karena kuadrannya berada pada kuadran pertama pada peta kekuatan organisasi maka itulah strategi yang harus di capai oleh Pemerintah Kampung Kiworo guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel. (S – O yakni Manfaatkan regulasi pengelolaan kampung permendagri no,113 tahun 2014, sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh guna mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Sasaran	Strategi	Langkah Kegiatan
Terwujudnya pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel di kampung kiworo	Memanfaatkan upah kerja standar minimum yang diperoleh perangkat kampung untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perangkat kampung pada bidang komunikasi, dan teknologi melalui pelatihan-pelatihan, seminar, diklat dan training-training. 2. Melakukan cek and ricek serta sosialisasi secara rutin. 3. Melakukan pergantian perangkat kampung yang memiliki keahlian dan kemampuan tinggi di bidang pengelolaan keuangan (khususnya pada pengelolaan keuangan kampung). 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan perangkat kampung seperti Kantor kampung, ATKkampung, Pakaian dinas perangkat kampung, komputer, meja, kursi dan lainnya.

Kesimpulan

Bertolak dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di kampung kiworo, distrik kimaam, kabupaten merauke, provinsi papua ini dan yang telah dilanjutkan dengan tahapan pembahasan dan analisis pengujian hipotesis, maka pada Bab V ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk beberapa pihak terkait terutama bagi pemerintah kampung kiworo dan bagi perpustakaan STIP-AN.

Tidak menutup kemungkinan saran-saran dan rekomendasi juga bermanfaat bagi para peneliti lain yang berminat melakukan penelitian tingkat lanjutan atau penelitian sejenis. Beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel di kampung kiworo dan, pengelolaan keuangannya masih sangat jauh dari harapan masyarakat kampung sebagai target group atau (Mereka yang merasakan dampak dari pada kebijakan yang dibuat oleh Policy Maker, dan yang dilaksanakan oleh Implementor terkait pengelolaan keuangan desa dikampung kiworo.
2. Adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas.
3. Strategi yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada pelaporan dan pengawasan dan evaluasi, dengan memanfaatkan regulasi Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu, sesuai dengan upah kerja standar minimum yang dimiliki perangkat kampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia kampung kiworo harus di perbaiki dengan menyekolahkan, atau banyak melakukan training-training, pelatihan dan studi banding ke

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

kampung-kampung yang lebih baik kebijakan pengelolaan keuangan kampungnya.

2. Pemerintah kampung baik pembuat kebijakan (Policy Maker)nya yaitu Kepala Kampung dan BAMUSKAM dan, juga pelaksana kebijakan (Implementor) nya dalam hal ini sekertaris kampung dan kaur-kaur yang pada struktur pemerintahan kampung kiworo dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya suai dengan regulasi sehingga harapan masyarakat (target group) dapat terpehuni dengan baik.
3. Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat desa kususnya dan bagi masyarakat pada umumnya karena selama ini kususnya di kampung kiworo tidak jelas sistem penggajian karena berbeda-beda jumlahnya dan jangka waktunya sehingga muncul kecuriagaan interen perangkat kampung dan di kalangan eksternal masyarakat kampung kiworo serta kampung-kampung lain di distrik kimaam kabupaten merauke tersebut.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Referensi

1. Nawawi, H. (Ed.). (2009). Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan Teori-Aplikasi. In *Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara.
2. Palapa, T. M., Yalindua, A., & Maramis, A. A. (2020). *Sustainable Community Empowerment Through the Program of Self-Sufficient Village of Non-Rice Food in Raanan Baru*. 448(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012113>
3. Chabib Soleh, Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa : Suatu Pengantar Ringkas*. Bandung: Fokusmedia.
4. Ermaya Suradinata. 2013. Analisis kepemimpinan strategi pengambilan keputusan: Alqaprint Jatinangor. Bandung
5. Handyaningrat. Soewarno, 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
6. Katz, Ellen, 2004, Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Policy, *Journal of Accountancy*, Juni 2004, hal. 1-2
7. Kosasih, Dadang, 2003, Reorientasi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Majalah Pemeriksaan*, Edisi No. 90, Juni-Juli, hal. 57-59
8. Kuntadi, Cris, 2002, Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, *Majalah Pemeriksaan*, Edisi No. 87, Oktober, hal. 22-16
9. Kottler Philip, dkk. 2000. *Marketing Management*. Singapore : Prentice Hall Pta Ltd.
10. Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta,
11. Mardiasmo, 2004, *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*, Cetakan Majalah Media Akuntansi, Edisi No. 39, April, hal. 12
12. Moenir, H.A.S, 1995 *Manajemen Pemerintahan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
13. Nataatmadja Soedardjat. 1993. *Kapita Selekta, Manajemen dan Kepemimpinan Serta Implementasinya*. Jakarta: Indo Hill co.